



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12  
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185  
PALANGKA RAYA 73112

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial antara lain terbatasnya dana, sarana, prasarana dan tenaga baik kualitas maupun kuantitas, sehingga kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan secara optimal. Namun demikian secara umum pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai rencana.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan Pengukuran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan selama Tahun 2024.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Januari 2025

**Kepala Dinas,**



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19770207 200312 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai sasaran strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Teknis dalam

jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Kesejahteraan Sosial.

2. Tingkat capaian kinerja bersumber dana APBD mencapai realisasi fisik 92,38%.
3. Anggaran Dinas Sosial dana APBD Tahun 2024 sebesar yaitu Rp. 108.413.700.926 (Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
4. Pelaksanaan program telah sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
5. Indikator Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :
  - a. Adanya peningkatan perubahan perilaku dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar.
  - b. Adanya peningkatan kesejahteraan penerima manfaat setelah mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan.
  - c. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan program pelayanan sosial.
  - d. Meningkatnya peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan permasalahan sosial di Kalimantan Tengah.
6. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan secara detail, perlu adanya survey lebih lanjut dan memerlukan waktu serta pembiayaan yang cukup memadai, namun sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan penguatan anggaran yang terfokus kepada Sasaran Strategis yang dimiliki Dinas Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB.I PENDAHULUAN	1
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Dan Misi .....	13
B. Tujuan dan Sasaran .....	17
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	20
D. Penetapan Kinerja 2024 .....	21
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	48
BAB.IV PENUTUP	
A. Penutup.....	51
B. Saran.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai bagian dari proses Pembangunan Nasional, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang menjamin setiap warga Negara untuk dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan meningkatkan potensi dan sumber pelayanan sosial dasar yang tersedia serta dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami dan melaksanakan proses pembangunan kesejahteraan sosial. Agar proses dimaksud dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dinas Sosial sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, berbagai Program dan Kegiatan baik yang bersumber dana APBD Provinsi maupun APBN secara integratif telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa Jabatan 2021-2024, dan bukan bersifat final karena pada tahun-tahun yang akan datang program dan kegiatan dimaksud akan berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, disusun sebagai dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Adapun materi dan substansi yang terdapat didalamnya adalah Penetapan Kinerja Tahunan 2024, Pengukuran Pencapaian Sasaran 2024, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan 2024.

## **B. KEDUDUKAN**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya). Dasar hukum organisasi adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin,

**UPTD** : terdiri dari 4 (empat) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "MAJAR TABELA"
  - a. Kepala Panti
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kasi Program dan Advokasi sosial
  - d. Kasi Rehabilitasi Sosial

2. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "RUHUI RAHAYU"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha

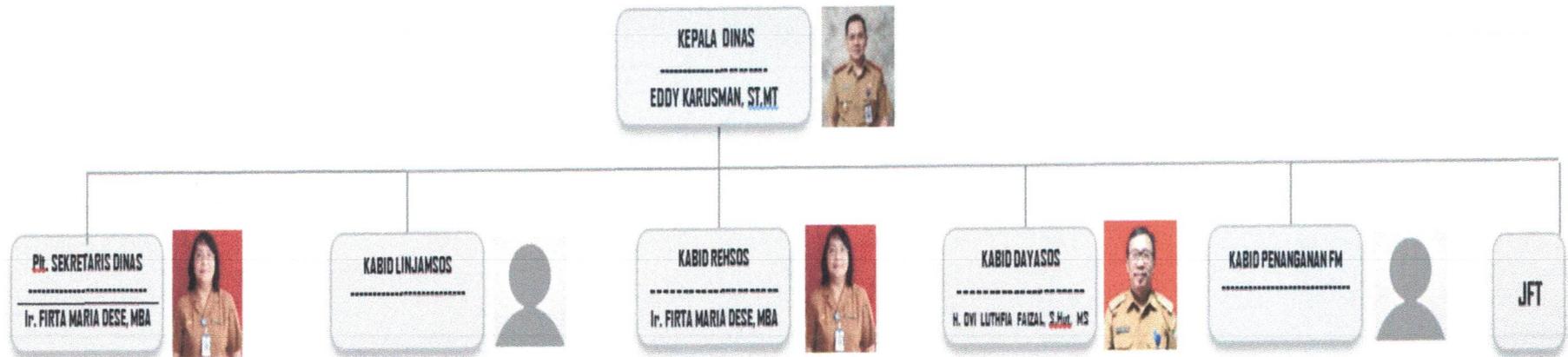
3. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sinta Rangkang"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kasi Program dan Advokasi sosial
- d. Kasi Rehabilitasi Sosial

4. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "PAMBELUM"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kasi Program dan Advokasi sosial
- d. Kasi Rehabilitasi Sosial

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSTW SINTA RANGKANG**



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSBR MAJAR TABELA**



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSBL PABELUM**



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSKW RUHUI RAHAYU**



#### D. SUMBER DAYA

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 143 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 103 orang dan pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak sebanyak 40 orang. Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	1 orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	24 orang	
4	Diploma Satu (D-1)	-	
5	Diploma Tiga (D-3)	8 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	7 orang	
7	Sarjana (S-1)	38 orang	
8	Sarjana (S-2)	24 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>103 orang</b>	

Dari jumlah PNS sebanyak 103 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	0	0	0	
2	I/d Juru Muda	0	0	0	
3	II/a Pengatur Muda	0	1	1	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	2	0	2	
5	II/c Pengatur	0	2	2	
6	II/d Pengatur Tk. I	4	4	8	
7	III/a Penata Muda	8	6	14	
8	III/b Penata Muda Tk.I	10	13	23	
9	III/c Penata	3	7	10	
10	III/d Penata Tk. I	11	11	22	
11	IV/a Pembina	4	9	13	
12	IV/b Pembina Tk. I	4	4	8	
13	IV/c Pembina Utama Muda	0	0	0	
14	IV/d Pembina Utama Madya	0	0	0	
	IV/e Pembina Utama	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	

Keterangan: \*)

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di Tabel 1.3

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	5	7
3	Eselon IV	3	7	10
4	Fungsional khusus (JFT )	16	19	35
	Analisis Kebijakan	1	-	1
	Dokter	1	-	1
	Perawat	1	1	2
	Psikolog Klinis	1	-	2
	Penyuluh Sosial Murni	2	2	4
	Penyuluh Sosial Penyetaraan	3	3	6
	Pekerja Sosial	3	12	15
	Pekerja Sosial Penyetaraan	2	-	2
	Pranata Komputer	1	-	1
	Instruktur Otomotif	1	-	1
	Perencana	-	1	1
5	Fungsional Umum	25	25	50
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>

## 2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

### a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	677	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	632	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	25	Orang
5	Pendamping Sosial PKH	242	Orang
	Jumlah	1.712	Orang

### b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	98	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	13	Lembaga
3	Karang Taruna	803	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	63	Lembaga
	Jumlah	977	

#### E. LINGKUP STRATEGIS

##### 1. Lingkungan Internal.

- a. Adanya struktur organisasi, Visi, Misi dan Strategi mampu memberikan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya.
- b. Sumber Daya Manusia  
Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun 2024 mempunyai Pegawai sebanyak 103 orang dengan kualitas pendidikan yang cukup baik yang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 18 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 85 orang
- c. Pedoman pelaksanaan program yang dibuat oleh penanggung jawab program/kegiatan dapat membantu para pelaksana kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kegiatan sesuai waktu, mutu dan sasaran.
- d. Dukungan dana APBD.
- e. Suasana kerja cukup kondusif.

## 2. Lingkungan Eksternal.

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan penguatan bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- e. Dukungan infrastruktur partisipasi masyarakat seperti PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), relawan sosial, tokoh masyarakat maupun lembaga masyarakat.
- f. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Sosial harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah maka Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Sosial selama 2021-2024 adalah mengikuti visi dan misi Gubernur yaitu pada misi keempat yang berbunyi:

**Kalimantan Tengah Makin BERKAH**  
**(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Sosial mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 khususnya pada misi ke Misi kedua (2) yaitu : “Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global” maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang disepakati oleh seluruh staf Dinas Sosial dan *stakeholders* telah mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Berkontribusi dalam penanganan Fakir Miskin.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial di masyarakat.

Secara terperinci, penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dinas sosial sebagai bagian program dari kementerian sosial mempunyai tugas pokok dalam melakukan penanganan kemiskinan. Penanganan tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan sosial berupa meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan peningkatan kualitas hidup;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun tidak semua golongan masyarakat mampu mencapai

kondisi sejahtera. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kelompok ini kemudian dikelompokkan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk membantu mereka mencapai kondisi sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain yang secara terus menerus mendampingi mereka sampai mereka mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat stimulan. Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap pihak lain.

Berdasarkan faktor penyebab, program yang diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi PPKS, disesuaikan dengan kondisi permasalahan sasaran yang kemudian dikelompokkan menjadi program yang bersifat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

### 3. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa keterbatasan antara kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga jangkauan pelayanan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka

diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Salah satu pihak yang paling mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan adalah masyarakat sekitar sasaran, baik secara individu maupun lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara sukarela dan bertujuan memberi pelayanan sosial.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan generasi muda dalam suatu negara, merupakan hal yang sangat strategis. Keberlangsungan suatu negara pada masa datang akan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mengelolanya. Negara akan terus berkembang dan maju, apabila generasi muda mempunyai kemampuan dan perilaku yang baik. Dan sebaliknya keberadaan negara akan bermasalah apabila generasi mudanya tidak mempunyai kepedulian yang tinggi dan tidak mampu menghormati apa yang telah diraih oleh para pendahulunya.

Globalisasi yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda saat ini. Banyak terjadi pergeseran yang mengarah kepada perilaku negatif. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini secara perlahan telah berubah. Keberadaban yang dimiliki bangsa Indonesia, perlahan menjadi hilang di ganti dengan budaya-budaya baru yang diadopsi dari negara lain.

Kondisi-kondisi diatas, apabila tidak ditangani secara dini akan menyebabkan hilangnya jati diri bangsa Indonesia yang sangat luhur. Kepedulian sosial akan luntur. Generasi muda tidak lagi merasa sebagai bagian dari pemegang amanah yang harus siap dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan negaranya. Mereka menjadi generasi apatis yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar dan bersifat individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri di banding dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, pemerintah harus memfasilitasi harapan dan meneruskan cita-cita pahlawan dalam memelihara budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu upaya adalah mengingatkan generasi muda tentang cita-cita pahlawan melalui kegiatan yang bersifat edukasi dan membangun kekuatan kebangsaan, melibatkan dalam kegiatan sosial, dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memotivasi secara lebih efektif terhadap penghargaan nilai-nilai kepahlawanan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Sosial. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

### **1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
  - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PPKS melalui upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS
  - Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PPKS
  - Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PPKS
- c. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja ;
- Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.
  - Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).
  - Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).
  - Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan kepada generasi muda.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Renstra periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
  - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
  - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;
  - Berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PPKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :
  - Meningkatnya Kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.
  - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PPKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :
  - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

- Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
  - Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang
  - Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.

### C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Lembaga
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Orang
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	Orang
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	Orang

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Keterangan</b>
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	Orang
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang
4.	Meningkatnya Pelindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	Keluarga
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan yang ditangani	TMP

#### **D. PENETAPAN KINERJA 2024**

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan program/kegiatan penanganan permasalahan sosial, kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp. 5.627.050.882
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	136 Orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Provinsi	Rp. 1.390.531.000
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	30 Orang	Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	Rp. 6.206.374.800
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota	100 Orang	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	Rp. 175.211.005

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	20 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Rp. 1.737.770.900
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	40 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Rp. 1.970.229.306
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Rp. 1.998.177.814
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	3 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis terlantar dalam panti	Rp. 274.746.965
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10 Orang	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	Rp. 939.940.713
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	50.000 Klg	KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	Rp. 2.567.500.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	50000 Orang	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 273.399.500
		Jumlah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	31605 orang	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp.51.909.963.800
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	4000 Orang	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 4.308.345.000
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp. 360.000.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

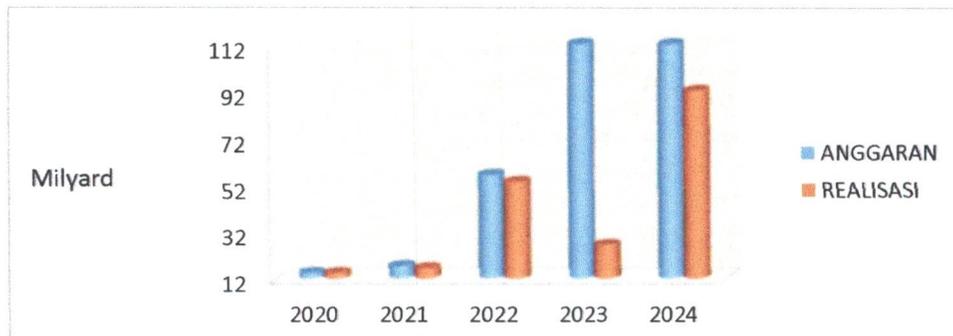
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2024. Untuk mencapai 6 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 Program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2024 sebesar 108.413.700.926 (Seratus delapan Milyar Empat ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 100.148.279.463 (Seratus Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 92,38 % dan realisasi fisik 100%.

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD  
Periode Tahun 2020 – 2024



Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan perubahan sasaran kegiatan ada setiap tahun berjalan. Tidak ada penurunan drastis terjadi pada tahun 2024. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2024. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja

APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2024			Ket
			2022	2023	Target	Realisasi	(%) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Lem-baga	1 Lem-baga	1 Lem-baga	1 Lembaga	100%	Tetap
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	126 Org	126 Org	136 Orang	136 Orang	100%	Naik
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	30 Org	30 Org	30 Orang	30 Orang	100%	Tetap
2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	75 Org	108 Org	200 Orang	200 Orang	100%	Naik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	20 Org	20 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Naik
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	40 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Tetap
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	65 Org	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	Tetap
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	-	3 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	Naik
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	20 Org	10 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	Naik
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	-	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	Tetap
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	150 Org	100 Org	100 Orang	100 Orang	100%	Tetap

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	100.320 Orang	100.320 Orang	100.320 Orang	100%	Tetap
5	Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	717 Org	4.140 Orang	4.140 Orang	4.140 Orang	100%	Tetap
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%	Tetap

## B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2024 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Dari enam indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya *benefits* maupun *impacts* beberapa kegiatan pada Tahun 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

### 1. Pengukuran Kinerja

#### a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$  : Berhasil

$55 \leq X < 70$  : Cukup Berhasil

$X < 55$  : Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya}) \times 100\%}{\text{Jumlah Indikator}}$$

b) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran dalam tataran output (keluaran) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah:

Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ( $\leq 70X$ <85)	Cukup Berhasil ( $55 \leq X <$ 70)	Tidak Berhasil ( $X < 55$ )
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	100			
2	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100			
3.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100			
4.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100			

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ( $\leq 70X$ <85)	Cukup Berhasil ( $55 \leq X <$ 70)	Tidak Berhasil ( $X < 55$ )
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	100			
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100			

Dari 6 (enam) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

•	Sangat Berhasil	5	100 %
•	Berhasil	-	-
•	Cukup Berhasil	-	-
•	Tidak Berhasil	-	-
	Jumlah	6	100%

### C) Uraian Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.4  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	136 Orang	126 Orang	126 Orang	100%	Terpenuhi
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	Terpenuhi

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah

berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Pada Tahun 2024 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

## 1.2 Realisasi Outcomes

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyanggah masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.
- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.
- Mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sinergi dan koordinasi TKSK dengan lintas sektor.





Gambar 1.1 Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dapat dilihat pada tabel 3.5 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.5  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
2.	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban tidak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ kota	108 Orang	200 Org	200 Orang	100%	Terpenuhi

Dalam sasaran ini kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana.

### 2.1 Realisasi Outcomes

Program ini dilaksanakan dalam sasaran ini diantaranya adalah memfasilitasi pemulang warga migran terlantar ke provinsi terdekat dalam upaya melindungi Warga negara tindak kekerasan dalam hal ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.



Gambar 2.1 Penanganan Warga Migran Terlantar

3. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dapat dilihat pada tabel 3.6 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	20 Orang	40 Orang	40 Org	100 %	Terpenuhi
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam panti	40 Orang	40 Orang	40 Org	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Lanjut Usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	3 Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	Terpenuhi
		Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar HIV/AIDS & NAPZA terlantar mendapatkan pelayanan dalam Panti	10 Orang	40 Orang	40 Orang	100 %	Terpenuhi

Program rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 20 orang kemudian ada sedikit penambahan di tahun 2024 menjadi 40 orang dikarenakan bertambahnya penerima manfaat (PM) dan ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum. Sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.

Dalam program pembinaan anak terlantar di dalam panti dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan keterampilan yang mengikuti masih sebanyak 40 orang dan belum ada mengalami penambahan dengan realisasi mencapai sekitar 100% capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi kendala untuk menambah target pada indikator tersebut adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana.

Secara berkala seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Program Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" Palangka Raya sebanyak 50 (lima puluh) orang berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti yang awalnya 80 orang menjadi 50 orang hal ini dikarena banyaknya penghuni panti yang meninggal dunia.

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis Terlantar dilaksanakan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah klien semula 3 (tiga) orang dan bertambah sebanyak 10 orang bentuk pelayanannya berupa pemberian permakanan, pemberian sandang, bimbingan fisik, bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan.

Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa semula 10 (sepuluh) orang menjadi 40 orang dengan 2 angkatan penambahan ini setelah di tahun 2022 ada pembagian anggaran untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis yang juga dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dan kemudian dikembalikan seperti semula.

### 3.2 Realisasi Outcomes

Sasaran ini merupakan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" (PSTW)
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik ( gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum (PSBL).

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran ini, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau sosialisasi bahaya HIV/AIDS di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan

keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran ini adalah meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi. Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.



Gambar 3.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Di dalam Panti

4. Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, dapat dilihat pada tabel 3.7 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	(%) capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	Terpenuhi
		Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100 Orang	100 Orang	100%	Terpenuhi
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.320 Orang	100.320 Orang	100 %	Terpenuhi

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

#### 4.2 Realisasi *Outcomes* (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Kaimantan Tengah seperti pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.



Gambar 4.1 Asistensi Penerima Bantuan

5. Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana, dapat dilihat pada Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	4.140 Orang	4.140 Orang	4.140 Orang	100%	Terpenuhi

Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

#### 5.2 *Outcomes* (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kaimantan Tengah seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penanganan Stunting. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan terencana.



Gambar 5.1 Penyaluran Bantuan

6. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dapat dilihat pada Tabel 3.9 Realisasi capaian Kinerja.

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Tanam Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100 %	Terpenuhi

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan TMP sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dan selalu terjaga kebersihannya dengan baik.





Gambar 6.1 Masyarakat yang menanam nilai- nilai Kepahlawanan

### C. ASPEK KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Pagu anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 108.413.700.926 (Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Sembilan) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 100.148.279.463 (Seratus Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi keuangan 92,38% realisasi fisik sebesar 100%.

Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	13.248.956.682	10.845.616.501	81,86
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan	175.211.005	152.555.400	87,07
3.	Program Rehabilitasi Sosial	6.920.865.698	5.671.865.015	81,95
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	54.800.863.300	54.122.912.246	98,76
5.	Program Penanganan Bencana	5.235.309.662	4.791.131.524	91,52
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	360.000.054	313.543.248	87,10

#### D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada Tahun Anggaran 2024 masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Mutasi jabatan yang cukup singkat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan.
4. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria PPKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.
2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2024 yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Ket .
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial</b>			<b>13.223.956.682</b>		<b>10.832.015.001</b>	<b>81,91</b>	
1.06.02.1.02 Pemberdayaan sosial Potensi Sumber Sosial Provinsi			13.223.956.682		10.832.015.001	81,91	
1	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	6.206.374.800	1 Lembaga	118.186.771	96,80	
2	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.390.531.000	136 Orang	1.215.660.463	87,42	
3	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	5.627.050.882	30 Orang	229.721.357	61,85	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>			<b>175.211.005</b>		<b>152.555.400</b>	<b>87,07</b>	
1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			175.211.005		152.555.400	87,07	
3.	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	187.463.607	200 Orang	134.375.000	71,68	
<b>1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial</b>			<b>6.920.865.698</b>		<b>5.671.865.016</b>	<b>81,95</b>	
4	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1.737.770.900	40 Orang	1.633.531.496	94,00	

5	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	1.970.229.306	40 Orang	1.398.456.817	70,98	
6	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	1.998.177.814	50 Orang	1.688.019.652	84,48	
7	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	274.746.965	10 Orang	183.130.100	66,65	
8	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	939.940.713	40 Orang	768.726.951	81,78	
<b>1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>54.800.863.300</b>		<b>54.122.912.246</b>	<b>98,76</b>	
9	1.06.05.1.02.01	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.567.500.000	50.000 Keluarga	2.503.128.366	97,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	273.399.500	100 Orang	132.536.380	48,48	
11	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	51.909.963.800	100.320 Orang	51.456.287.500	99,13	
<b>1.06.06 Program Penanganan Bencana</b>			<b>5.235.309.662</b>		<b>4.791.131.524</b>	<b>91,52</b>	
12	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	5.235.309.662	4140 Orang	4.791.131.524	91,52	
<b>1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			<b>360.000.054</b>		<b>313.543.248</b>	<b>87,10</b>	

13	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	360.000.054		313.543.248	87,10	
----	--------------	--	-------------	--	-------------	-------	--

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. PENUTUP**

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik sehingga realisasi keuangan dan realisasi kegiatan cukup baik.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2024 adalah penyempurnaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sempurna. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan yang mengganggu kinerja program. Kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditingkatkan dengan berkaca pada Laporan Kinerja ini.

### **B. SARAN**

Memperhatikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana yang telah tercermin pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan yaitu :

1. Diperlukan penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti penanggulangan kemiskinan. Bila dicermati kondisi saat ini, antara besaran dana Daerah masih relatif perlu penambahan, Sehingga hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program/kegiatan pada jangka panjang.
2. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergitas program. Dengan demikian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kesatuan perencanaan yang terpadu dan saling mendukung. Program-program yang diluncurkan pusat dapat diteruskan secara tepat sasaran oleh pemerintah daerah dan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Palangka Raya, Januari 2025

**Kepala Dinas,**



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004